

# TRANSFORMASI VISI UEA 2021: KAJIAN PENDEKATAN SOSIOLOGI AGAMA DALAM PEMBANGUNAN NEGARA MUSLIM MODERN

Fakih Fadilah Muttaqin<sup>1</sup>, Aris Munandar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

<sup>1</sup>fakihfm17@gmail.com

<sup>2</sup>arism2365@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana Uni Emirat Arab (UEA) mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembangunan sosial-politik modern melalui pendekatan sosiologi agama. Dengan fokus pada visi pembangunan nasional UEA 2021, makalah ini menganalisis bagaimana nilai-nilai seperti masalah (kepentingan umum), maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariah), dan hikmah (kebijaksanaan) digunakan secara sistematis oleh negara dalam proses modernisasi dan reformasi institusional. Studi ini menunjukkan bahwa Islam di UEA tidak hanya dijadikan sebagai fondasi etika, tetapi juga sebagai sumber legitimasi simbolik dan alat rekayasa sosial yang mendukung stabilitas, integrasi nasional, serta konsolidasi kekuasaan negara. Dengan menggunakan kerangka sosiologi agama, makalah ini mengurai bagaimana simbol-simbol dan nilai-nilai Islam digunakan dalam pidato kenegaraan, kebijakan publik, dan pembangunan institusi seperti General Authority of Islamic Affairs and Endowments dan Ministry of Tolerance and Coexistence. Di samping itu, studi ini juga mengeksplorasi peran Islam dalam soft power UEA melalui diplomasi antaragama dan pembangunan ekonomi syariah, yang mengukuhkan posisi UEA sebagai negara Muslim modern yang adaptif terhadap globalisasi tanpa melepaskan akar nilai keagamaannya. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa visi UEA 2021 bukan sekadar proyek pembangunan teknokratis, tetapi juga proyek kultural dan religius yang menjadikan Islam sebagai kekuatan pemersatu dan pengarah perubahan sosial. Dengan demikian, makalah ini memberi kontribusi dalam memahami dinamika hubungan antara agama dan pembangunan negara di dunia Muslim kontemporer.

**Kata Kunci:** UEA, sosiologi agama, pembangunan Islam modern, Visi 2021, negara Muslim

### ***Abstract***

*This study discusses how the United Arab Emirates (UAE) integrates Islamic values in modern socio-political development through a socio-political approach to religion. Focusing on the UAE's national development vision 2021, this paper analyzes how values such as *maslahah* (public interest), *maqashid al-shariah* (sharia goals), and *hikmah* (wisdom) are systematically used by the state in the process of modernization and institutional reform. This study shows that Islam in the UAE is not only used as an ethical foundation, but also as a source of symbolic legitimacy and a tool of social engineering that supports stability, national integration, and the consolidation of state power. Using the framework of the sociology of religion, this paper unravels how Islamic symbols and values are used in state discourse, public policy, and institutional building such as the General Authority of Islamic Affairs and Endowments and the Ministry of Tolerance and Coexistence. In addition, the study also explores the role of Islam in the UAE's soft power through interfaith diplomacy and sharia economic development, which reinforces the UAE's position as a modern Muslim country that is adaptive to globalization without relinquishing its roots of religious values. The results of this study show that the UAE's vision for 2021 is not only a technocratic development project, but also a cultural and religious project that makes Islam a unifying force and a guide to social change. Thus, this paper contributes to understanding the dynamics of the relationship between religion and state-building in the contemporary Muslim world.*

**Keywords:** *UAE, sociology of religion, modern Islamic development, Vision 2021, Muslim countries*

## **PENDAHULUAN**

Modernisasi di dunia Islam merupakan diskursus kompleks, berbeda dengan Barat yang mengalami sekularisasi. Negara-negara Muslim, seperti Uni Emirat Arab (UEA), menghadapi dilema antara menjaga nilai keislaman dan beradaptasi dengan perkembangan global (Asad, 2003; Hurd, 2008). UEA, sejak kemerdekaannya tahun 1971, berhasil bertransformasi dari wilayah gurun menjadi negara maju secara fisik, sosial, dan institusional (Al Orami, 2020; Jones, 2018). Pembangunan kota modern seperti Dubai dan Abu Dhabi menjadi simbol kemajuan ekonomi, namun lebih penting adalah upaya UEA mempertahankan identitas Islam di tengah modernisasi (Kay, 2024; Mustaffa & Abadi, 2024). Strategi ini terangkum dalam UAE Vision 2021 yang menjadi panduan pembangunan berkelanjutan hingga usia emas kemerdekaan (Schneider, n.d.; Al Saadi, 2021).

Visi 2021 UEA menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada ekonomi dan teknologi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi moral dalam menghadapi globalisasi (Mandaville & Hamid, 2018; Koleva, 2021). Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga identitas nasional meliputi bahasa, budaya, dan agama Islam—sebagai salah satu pilar utama pembangunan, yang dipahami bukan sebagai sekularisasi, melainkan penyelarasan Islam dengan modernitas (Tlaiss & McAdam, 2021; Laurano, 2023).

Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi agama menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana agama memainkan peran dalam struktur sosial dan politik UEA. Sosiologi agama melihat agama tidak hanya sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang memengaruhi legitimasi kekuasaan dan nilai-nilai masyarakat (Gärtner & Winkel, 2021; Casanova, 1994). Pemikiran Durkheim yang menekankan agama sebagai perekat sosial dan Weber yang melihatnya sebagai penggerak rasionalisasi sosial, memberi dasar teoretis dalam memahami integrasi Islam dalam sistem negara modern seperti UEA (Laurano, 2023; Rusydi, 2019).

Dalam konteks UEA, Islam tidak hanya hadir secara simbolik, melainkan menjadi dasar normatif dalam kebijakan publik, pendidikan, dan sosial-ekonomi. Nilai-nilai seperti *maslahah*, *maqashid al-shariah*, dan *hikmah* menjadi pedoman dalam perumusan arah pembangunan yang tidak hanya material, tetapi juga spiritual dan sosial (Janwari & Al-Hakim, 2024; Mustaffa & Abadi, 2024).

Namun, UEA tidak mengadopsi pendekatan konservatif atau legalistik terhadap Islam. Sebaliknya, negara ini mengambil pendekatan pragmatis dan kontekstual, dengan membangun bentuk Islam yang moderat dan adaptif terhadap tuntutan global. Hal ini tampak dalam kebijakan yang mendukung toleransi, pemberdayaan perempuan, dialog antaragama, dan inovasi (Mustaffa & Abadi, 2024; Kay, 2024; Kourgiotis, 2020).

Lebih dari itu, UEA memposisikan Islam sebagai bagian dari diplomasi global melalui berbagai inisiatif seperti “Year of Tolerance 2019” dan

pembangunan *Abrahamic Family House*. Upaya ini menunjukkan bagaimana Islam dijadikan simbol soft power dan strategi diplomatik dalam membentuk citra negara yang inklusif dan multikultural di panggung internasional (Monier, 2023; Al Oraimi, 2020; Jones, 2018; Laurano, 2023).

Studi terhadap UEA melalui pendekatan sosiologi agama sangat relevan karena memungkinkan pemahaman Islam sebagai institusi sosial yang aktif membentuk arah pembangunan negara. Islam di UEA tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya atau etika pribadi, tetapi sebagai sistem nilai yang dijalankan oleh negara untuk membentuk masyarakat, melegitimasi kekuasaan, dan merespon tantangan modernitas (Turner, 2011; Casanova, 1994; Asad, 2003). Hal ini menjadi penting di tengah masyarakat UEA yang sangat plural, dengan mayoritas penduduknya adalah ekspatriat dari berbagai latar budaya dan agama (Al Saadi, 2021; Schneider, n.d.).

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana UEA mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembangunan modern melalui pendekatan sosiologi agama. Dengan menelaah dokumen UAE Vision 2021, kebijakan publik, dan retorika elite politik, pendekatan ini menjelaskan hubungan antara agama, kekuasaan, dan transformasi sosial (Gärtner & Winkel, 2021; Eickelman & Piscatori, 2004). Studi ini berargumen bahwa pembangunan di UEA bukan sekularisasi, tetapi reformulasi nilai-nilai Islam dalam bingkai modernitas global (Hurd, 2008; Roy, 2004).

Melalui strategi yang kontekstual dan pragmatis, UEA menunjukkan bahwa tradisi dan kemajuan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Negara ini membuktikan bahwa Islam dapat menjadi fondasi produktif dalam pembangunan sosial-politik modern (Mahmood, 2011; Agrama, 2010). Dengan demikian, UEA menawarkan model alternatif pembangunan bagi negara-negara Muslim lain yang ingin tetap menjaga identitas keagamaannya. Pendekatan sosiologi agama memberikan kerangka utuh dan kontekstual untuk memahami dinamika hubungan antara agama, negara, dan pembangunan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologi agama untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan dalam pembangunan modern di Uni Emirat Arab (UEA), khususnya melalui visi strategis *UAE Vision 2021*. Pendekatan sosiologi agama dipilih karena mampu menjelaskan peran agama sebagai institusi sosial yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari struktur negara, legitimasi kekuasaan, dan arah modernitas. Kerangka teoretis penelitian ini merujuk pada pemikiran Émile Durkheim tentang agama sebagai perekat sosial, Max Weber yang melihat agama sebagai penggerak rasionalisasi sosial, serta Casanova dan Talal Asad yang menyoroti agama dalam ruang publik dan relasinya dengan kekuasaan modern.

Objek utama penelitian ini meliputi dokumen resmi *UAE Vision 2021*, kebijakan pemerintah terkait pembangunan, pernyataan publik elite negara, serta inisiatif diplomatik seperti *Year of Tolerance* dan pembangunan *Abrahamic Family House*. Sumber data terdiri dari data primer berupa dokumen-dokumen resmi pemerintah UEA dan pidato kenegaraan, serta data sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, buku teori, laporan kebijakan internasional, dan berita dari media terpercaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan analisis data secara kualitatif menggunakan metode analisis wacana dan tematik untuk mengidentifikasi bagaimana Islam diformulasikan sebagai nilai dasar pembangunan.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis data, diskusi akademik (peer debriefing), dan konsistensi penggunaan teori sosiologi agama sebagai pisau analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menampilkan pemahaman yang utuh dan kontekstual tentang integrasi agama, negara, dan pembangunan dalam kasus UEA, serta relevansinya sebagai model alternatif pembangunan negara Muslim modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PENDEKATAN SOSIOLOGI AGAMA: KONSEP DAN PERKEMBANGAN**

Sosiologi agama adalah cabang dari sosiologi yang secara khusus mempelajari hubungan antara agama dan masyarakat. Pendekatan ini muncul dari kesadaran bahwa agama, selain sebagai sistem kepercayaan dan ibadah, juga merupakan kekuatan sosial yang nyata dalam kehidupan sehari-hari (Casanova, 1994; Gärtner & Winkel, 2021). Ia tidak hanya membentuk perilaku individu, tetapi juga mengatur norma sosial, memperkuat struktur kekuasaan, dan menciptakan solidaritas kolektif. Oleh karena itu, dalam konteks studi Islam kontemporer—terutama ketika membahas peran negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dalam menggunakan Islam sebagai fondasi pembangunan pendekatan ini menjadi sangat relevan (Asad, 2003; Turner, 2011).

Secara historis, sosiologi agama berkembang sebagai respons terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang peran agama dalam masyarakat modern yang mengalami perubahan cepat akibat industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi (Berger, 1967; Hefner, 1998). Tiga tokoh utama dalam kelahiran sosiologi agama klasik adalah Émile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Masing-masing menyajikan cara pandang berbeda tentang agama sebagai fenomena sosial, namun semuanya sepakat bahwa agama memainkan peran penting dalam dinamika masyarakat (Laurano, 2023; Rusydi, 2019).

### **Agama sebagai Sumber Solidaritas dan Legitimasi dalam Pembangunan Modern: Perspektif Durkheim dan Weber**

Dalam perspektif sosiologi agama, pemikiran Émile Durkheim dan Max Weber memberikan landasan kuat untuk memahami peran strategis Islam dalam pembangunan modern di Uni Emirat Arab (UEA). Durkheim melihat agama sebagai ekspresi kolektif masyarakat yang menciptakan solidaritas sosial melalui nilai-nilai bersama. Dalam konteks UEA, Islam berfungsi sebagai perekat sosial di tengah masyarakat multietnis dan mayoritas ekspatriat, menjadi identitas kolektif yang mempersatukan populasi yang beragam melalui simbol dan norma moral bersama. Konsep solidaritas mekanik dan organik Durkheim relevan dalam melihat bagaimana UEA mempertahankan integrasi sosial melalui nilai-nilai Islam yang diformulasikan dalam ruang publik dan kebijakan negara.

Sementara itu, Max Weber menyoroti dimensi transformatif agama, di mana Islam di UEA tidak hanya bersifat konservatif, tetapi juga mendorong proses rasionalisasi dalam kebijakan publik. Nilai-nilai seperti *ijtihad*, *maslahah*, dan *hikmah* dimanfaatkan untuk membentuk pemerintahan yang efisien dan modern, namun tetap berpijak pada etika Islam. Weber juga menjelaskan bagaimana agama berperan dalam memberikan legitimasi kekuasaan, yang dalam kasus UEA tampak dari perpaduan antara otoritas tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Pemimpin UEA tampil sebagai figur religius-modern yang menggunakan Islam tidak hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai sumber otoritas moral dan politik. Dengan demikian, Islam di UEA berperan ganda: sebagai kekuatan integratif yang membangun solidaritas sosial dan sebagai instrumen legitimasi dalam struktur kekuasaan negara modern.

Kombinasi pemikiran Durkheim dan Weber dalam konteks UEA menunjukkan bahwa agama tidak hanya bertahan dalam era modern, tetapi juga mengalami transformasi fungsional. Islam menjadi sumber nilai yang dinamis—tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan. UEA menjadikan Islam sebagai kerangka normatif yang lentur, yang mampu beradaptasi dengan tuntutan global tanpa kehilangan identitas. Hal ini memperlihatkan bahwa modernisasi dalam konteks negara Muslim tidak harus berarti sekularisasi, melainkan bisa berupa proses rekontekstualisasi agama untuk menjawab tantangan zaman. Studi terhadap UEA memperlihatkan bahwa dengan pendekatan sosiologi agama, kita dapat memahami bahwa agama tetap relevan dan bahkan esensial dalam membentuk proyek pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai.

### **Rekontekstualisasi Agama dalam Negara Modern: Perspektif Berger, Asad, dan Turner**

Dalam perkembangan kontemporer sosiologi agama, para pemikir pasca-klasik seperti Peter L. Berger, Talal Asad, dan Bryan Turner menawarkan kerangka analisis yang lebih kompleks terhadap peran agama dalam masyarakat modern, termasuk dalam konteks negara Muslim seperti Uni Emirat Arab (UEA). Peter L.

Berger, dalam *The Sacred Canopy* (1967), berargumen bahwa meskipun modernitas mendorong proses sekularisasi, agama tetap menjadi sumber makna dan ketertiban sosial yang menyediakan “langit makna” bagi kehidupan manusia. Namun, teori sekularisasi Berger cenderung berakar pada pengalaman historis Barat dan tidak sepenuhnya berlaku di dunia Islam.

Talal Asad mengkritik asumsi universalitas sekularisasi dan menunjukkan bahwa Islam memiliki bentuk modernitas tersendiri, di mana agama tidak pernah sepenuhnya dipisahkan dari ranah publik. Dalam kerangka ini, UEA menjadi contoh konkret bagaimana negara Muslim tidak mengalami sekularisasi dalam arti Barat, tetapi justru membentuk model integrasi baru antara agama dan negara. Modernitas UEA dibangun bukan dengan meminggirkan Islam, melainkan dengan merekontekstualisasikan nilai-nilainya dalam tata kelola modern dan kebijakan publik yang inklusif (Asad, 2003; Mahmood, 2011).

Sementara itu, Bryan Turner melihat agama dalam dunia modern sebagai bentuk *kapital simbolik* yang memiliki nilai strategis dalam pembentukan otoritas dan legitimasi. Negara-negara Muslim, menurut Turner, ditantang untuk merasionalisasi agama dalam kebijakan tanpa menghilangkan dimensi spiritual dan otoritas moralnya. UEA tampaknya berhasil menjawab tantangan ini melalui pendekatan administratif yang terorganisir, dengan menjadikan Islam sebagai bagian dari nilai sosial dan sistem regulatif negara. Islam tidak hanya dikelola secara simbolik, tetapi juga diinstitusionalisasikan secara sistematis dalam pendidikan, hukum, dan narasi kenegaraan, menjadikannya elemen sentral dalam proyek pembangunan nasional (Turner, 2011; Tlaiss & McAdam, 2021; Monier, 2023). Dengan demikian, pemikiran para tokoh ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana agama, terutama Islam, tetap berperan aktif dan dinamis dalam konfigurasi negara modern seperti UEA.

### **Relevansi untuk Studi Islam dan UEA**

Pendekatan sosiologi agama memberi kita kerangka yang tajam untuk membaca bagaimana Islam bukan sekadar teks atau ajaran, melainkan *praksis sosial* yang dijalankan melalui institusi, sistem nilai, dan kebijakan negara (Asad,

2003; Gärtner & Winkel, 2021). Dalam konteks UEA, pendekatan ini menjelaskan bagaimana negara mengintegrasikan Islam dalam proyek modernitas tanpa harus tunduk pada sekularisme (Agrama, 2010; Mustaffa & Abadi, 2024).

UEA bukan negara sekuler dalam pengertian pemisahan total antara agama dan negara, tetapi juga bukan negara teokratis yang menjadikan syariat sebagai hukum mutlak. Sebaliknya, UEA mempraktikkan bentuk negara Muslim modern yang menjadikan Islam sebagai nilai kultural dan sumber legitimasi sosial-politik (Kourgiotis, 2020; Monier, 2023). Dalam kerangka sosiologi agama, ini adalah bentuk *religious governance* yang adaptif dan strategis, di mana agama tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga secara operasional dalam perencanaan pembangunan (Mandaville & Hamid, 2018; Kay, 2024).

Dengan pendekatan ini, Islam tidak ditempatkan sebagai antitesis modernitas, tetapi sebagai mitra aktif dalam membentuk arah kemajuan (Roy, 2004; Moosa, 2006). Inilah yang membedakan UEA dari banyak negara lain di dunia Islam: kemampuan untuk mengartikulasikan ulang nilai Islam dalam bahasa kebijakan, pembangunan, dan globalisasi (Tlaiss & McAdam, 2021; Koleva, 2021).

### **ISLAM SEBAGAI SISTEM SOSIAL DAN POLITIK DI UEA**

Dalam pendekatan sosiologi agama, Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan atau praktik ibadah individual, tetapi sebagai sistem sosial yang hidup dalam institusi, kebijakan publik, serta struktur politik suatu masyarakat. Islam memiliki potensi normatif dan fungsional untuk mempengaruhi serta membentuk tatanan sosial dan negara. Dalam konteks Uni Emirat Arab (UEA), peran Islam sangat nyata, bukan hanya dalam ruang spiritual, tetapi juga dalam konstruksi sosial dan politik negara. Negara ini secara aktif menjadikan Islam sebagai basis nilai dalam proses pembangunan, pengaturan sosial, dan legitimasi kekuasaan (Budiarti & Anggraeni, 2023).

Secara historis, sejak kemerdekaannya pada tahun 1971, UEA telah menjadikan Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari jati diri nasional. Konstitusi sementara yang disahkan saat federasi dibentuk menyebutkan bahwa Islam adalah

agama resmi negara, dan syariat Islam menjadi sumber utama legislasi. Meskipun dalam praktiknya tidak seluruh hukum didasarkan pada syariat secara literal, prinsip-prinsip Islam tetap dijadikan kerangka nilai utama dalam perumusan kebijakan, pendidikan, hukum keluarga, dan struktur sosial masyarakat (Al Mula, 2020).

### **Islam sebagai Basis Kultural dan Identitas Nasional**

UEA merupakan negara dengan struktur demografis yang unik. Penduduk asli Emirat hanya sekitar 11–12% dari total populasi, sementara sisanya adalah ekspatriat dari berbagai negara, budaya, dan agama. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan identitas bersama menjadi sangat krusial. Islam, dalam konteks ini, berfungsi sebagai fondasi kultural yang menyatukan masyarakat Emirat. Melalui simbol, ritual, dan retorika keagamaan, negara membentuk narasi identitas nasional yang tidak eksklusif, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Upaya negara dalam memperkuat identitas Islam dapat dilihat dalam banyak kebijakan, seperti pengajaran agama Islam di sekolah negeri, pengelolaan masjid oleh negara, serta pengawasan terhadap khutbah Jumat dan materi dakwah (Durkheim, 2015).

General Authority of Islamic Affairs and Endowments (GAIAE) menjadi lembaga kunci dalam mengatur konten keagamaan agar selaras dengan visi nasional. Negara bahkan memiliki sistem penilaian untuk khatib dan pengkhotbah, serta meluncurkan program pelatihan dakwah yang mempromosikan moderasi, toleransi, dan nasionalisme (Al Mula, 2020). Menurut Durkheim (2015), agama berfungsi sebagai simbol solidaritas sosial. Dalam konteks UEA, Islam tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga sarana integrasi masyarakat dan penciptaan "kesadaran kolektif" di tengah masyarakat yang sangat plural.

Islam dijadikan bahasa nilai yang melampaui kesukuan, kebangsaan, dan latar belakang ekonomi. Dengan demikian, agama dalam konteks UEA tidak berfungsi memecah, tetapi menyatukan keragaman menjadi satu identitas nasional yang stabil dan bermoral (Al Mula, 2020).

### **Islam dalam Sistem Pendidikan dan Sosialisasi Nilai**

Pendidikan menjadi salah satu sektor utama di mana negara mengartikulasikan Islam sebagai sistem nilai. Dalam kurikulum nasional UEA, pelajaran Islam tidak hanya diajarkan sebagai kewajiban agama, tetapi sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa. Nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial, etika kerja, penghargaan terhadap ilmu, dan semangat kewirausahaan dipadukan dengan ajaran Islam klasik dalam pelajaran yang diberi muatan kontekstual (Budiarti & Anggraeni, 2023).

Visi 2021 secara eksplisit menyebut bahwa sistem pendidikan harus "menanamkan nilai-nilai Islam dan budaya Emirat sekaligus mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global." Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak melihat Islam dan modernitas sebagai entitas yang saling bertentangan. Sebaliknya, Islam dijadikan perangkat sosial untuk membangun "Muslim global" yang modern, kompeten, dan tetap setia pada akar nilai lokal (Durkheim, 2015).

Ini sejalan dengan pandangan Weber tentang agama sebagai kekuatan rasionalisasi nilai. Dalam Islam, konsep 'ilm (ilmu), hikmah (kebijaksanaan), dan ijtihad (usaha intelektual) dapat digunakan untuk membangun sistem pendidikan yang tidak dogmatis, tetapi progresif. UEA memanfaatkan potensi ini untuk membentuk model pendidikan Islam yang tidak eksklusif, tetapi terbuka dan produktif dalam konteks globalisasi (Budiarti & Anggraeni, 2023).

### **Islam dalam Kebijakan Sosial dan Hukum**

Islam juga menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan sosial dan hukum, terutama dalam bidang keluarga, warisan, dan moral publik. Hukum keluarga di UEA masih mengacu pada fiqh Islam, meskipun diberikan ruang bagi non-Muslim untuk menggunakan sistem hukum sipil. Dalam hal ini, UEA mempraktikkan pluralisme hukum dengan tetap mempertahankan nilai Islam sebagai norma dasar bagi warga Muslim (Al Mula, 2020).

Nilai masalah (kepentingan umum) dan maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) dijadikan rujukan dalam kebijakan publik. Misalnya, pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan dipahami sebagai pelaksanaan hifz al-nafs

(perlindungan jiwa) dan *hifz al-‘aql* (perlindungan akal). Program subsidi, pengembangan kesejahteraan, dan distribusi kekayaan juga dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Negara bahkan menggunakan zakat sebagai instrumen kebijakan sosial, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara terorganisir oleh negara, bukan hanya melalui jalur individual (Budiarti & Anggraeni, 2023).

Islam dalam konteks ini menjadi bukan sekadar “agama pribadi”, tetapi bagian dari sistem sosial-politik negara. Ia memberikan justifikasi moral terhadap kebijakan negara sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Pendekatan ini konsisten dengan model *religious governance* yang tidak selalu teokratis, tetapi sangat mengandalkan nilai agama dalam menyusun struktur kekuasaan dan kehidupan sosial (Durkheim, 2015).

## **AGAMA DAN LEGITIMASI KEKUASAAN DI NEGARA MUSLIM MODERN**

Salah satu isu sentral dalam pendekatan sosiologi agama adalah bagaimana agama berperan dalam membentuk, mempertahankan, dan melegitimasi struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks negara Muslim modern seperti Uni Emirat Arab (UEA), peran agama tidak hanya terbatas sebagai ajaran moral atau sistem nilai individu, tetapi juga menjadi fondasi simbolik dan institusional dalam relasi antara negara dan rakyat. Islam tidak hanya hadir sebagai sumber spiritual, tetapi juga sebagai landasan legitimasi politik dan sosial. Dalam kerangka ini, sosiologi agama menawarkan lensa untuk memahami bagaimana agama digunakan secara strategis oleh negara untuk membentuk stabilitas politik, keabsahan pemerintahan, dan narasi kebangsaan (Sahih, 2021).

### **Konsep Legitimasi dalam Pemikiran Max Weber**

Max Weber, dalam tipologi klasiknya tentang otoritas, menyebutkan tiga jenis legitimasi kekuasaan: otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal-rasional. Ketiganya tidak eksklusif, melainkan sering beroperasi secara bersamaan dalam sebuah sistem politik. Dalam negara-negara Muslim seperti UEA,

ketiga bentuk ini dapat ditemukan dan sering kali diikat oleh kekuatan simbolik agama (Weber, 1968).

Otoritas tradisional terlihat dari sistem monarki warisan keluarga yang telah menjadi ciri khas negara-negara Teluk. Otoritas karismatik tampak dalam figur pemimpin yang dianggap visioner, bijak, dan “melindungi rakyatnya”. Sedangkan otoritas legal-rasional muncul dalam sistem birokrasi modern dan hukum yang diatur oleh konstitusi dan regulasi negara. Namun, kekhasan dari sistem ini adalah bagaimana ketiganya mendapatkan dukungan moral dari agama, yakni Islam. Dengan kata lain, agama berfungsi sebagai pengikat simbolik yang memberi legitimasi kultural, moral, dan spiritual terhadap kekuasaan negara (Sahih, 2021).

### **Islam sebagai Sumber Legitimasi Simbolik dan Soft Power di Uni Emirat Arab**

Uni Emirat Arab (UEA) secara konsisten memanfaatkan Islam tidak hanya sebagai landasan legitimasi kekuasaan domestik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam politik luar negeri dan diplomasi nilai. Di tingkat domestik, pemerintah UEA menempatkan simbol-simbol keislaman sebagai pilar utama dalam membangun otoritas dan kohesi sosial. Para pemimpin negara, mulai dari Presiden hingga Emir di masing-masing wilayah, secara rutin mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta konsep-konsep Islam seperti mas'uliyah (tanggung jawab), shura (musyawarah), dan adl (keadilan) dalam pidato resmi mereka. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa legitimasi politik UEA bukan semata-mata bersandar pada otoritas formal negara, tetapi juga pada nilai-nilai agama yang diterima luas oleh masyarakat (General Authority of Islamic Affairs and Endowments (GAIAE) 2021).

Penerapan retorika keagamaan tersebut diperkuat melalui kontrol institusional terhadap aktivitas keagamaan di ranah publik. GAIAE secara sistematis mengatur tema khutbah Jumat yang seragam di seluruh masjid negara, dengan konten yang menekankan persatuan, stabilitas sosial, kerja keras, ketaatan kepada penguasa, dan loyalitas nasional—semua dikemas dalam dalil-dalil Islam (GAIAE, 2021). Dari perspektif teori sosiologi agama Emile Durkheim, praktik ini

mencerminkan fungsi agama sebagai mekanisme reproduksi nilai-nilai sosial yang krusial bagi kelangsungan negara. Agama tidak hanya menjalankan fungsi ritual ibadah, tetapi juga berperan sebagai sarana sosialisasi nilai, pembentukan kesadaran kolektif, serta pemersatu identitas nasional di tengah masyarakat yang heterogen dan mayoritas terdiri dari ekspatriat non-Emirat (Durkheim, 1912).

Di ranah internasional, Islam berperan sebagai soft power yang mengukuhkan posisi UEA sebagai kekuatan moral dan pusat Islam moderat. UEA aktif mengusung Islam sebagai agama toleransi dan koeksistensi damai melalui berbagai inisiatif antaragama, salah satunya adalah penyelenggaraan “Global Conference of Human Fraternity” yang melahirkan Document on Human Fraternity dokumen yang ditandatangani oleh Grand Imam Al-Azhar dan Paus Fransiskus pada 2019 di Abu Dhabi (Al-Azhar & Paus Fransiskus, 2019). Pembangunan Abrahamic Family House di Pulau Saadiyat, sebuah kompleks ibadah untuk tiga agama besar (Islam, Kristen, dan Yahudi), menjadi simbol nyata komitmen UEA dalam mempromosikan nilai-nilai Islam universal sebagai fondasi toleransi dan perdamaian global (Al-Azhar & Paus Fransiskus, 2019).

Pendekatan diplomasi keagamaan ini sejalan dengan gagasan Peter L. Berger yang menegaskan bahwa dalam era globalisasi, agama bukan sekadar reliq masa lalu, melainkan sumber identitas dan legitimasi yang dapat diperbaharui secara simbolik untuk membangun narasi baru dalam arena politik internasional (Berger, 1999). Dengan memanfaatkan Islam sebagai alat soft power, UEA tidak hanya memperkuat otoritasnya di dalam negeri, tetapi juga meningkatkan pengaruh strategisnya di kawasan Timur Tengah, memperluas jaringan diplomasi berbasis nilai keagamaan yang mendukung posisi geopolitiknya (Sahih, 2021).

Dengan demikian, Islam di UEA berfungsi ganda: sebagai sumber legitimasi simbolik yang memperkokoh stabilitas politik domestik dan sebagai modal budaya yang menguatkan peran negara dalam kancah diplomasi global yang berbasis pada nilai-nilai moral dan toleransi.

### **Institusionalisasi Agama dan Pengelolaan Legitimasi**

Yang membedakan UEA dari negara-negara Muslim lain adalah kemampuan institusionalnya dalam mengelola agama secara profesional. Tidak seperti beberapa negara Muslim yang membiarkan agama berkembang tanpa kontrol negara (yang berisiko menumbuhkan ekstremisme), UEA mengambil pendekatan top-down yang strategis. Negara memiliki kontrol atas institusi keagamaan, pengangkatan imam, dan bahkan konten keagamaan yang diajarkan di ruang publik (General Authority of Islamic Affairs and Endowments, 2021).

Pendekatan ini menimbulkan perdebatan: apakah kontrol negara atas agama ini tidak menjadikan Islam sebagai alat negara? Namun dalam pendekatan sosiologi agama, hal tersebut justru menunjukkan bahwa agama telah menjadi bagian dari sistem sosial-politik yang fungsional. Islam tidak lagi berada di luar negara, tetapi menjadi mitra institusional yang mengisi ruang publik secara terstruktur dan terkendali (Asad, 2003).

Dalam hal ini, konsep Talal Asad tentang “Islam sebagai tradisi diskursif yang dibentuk oleh institusi dan kekuasaan” sangat relevan. Asad menolak ide netralitas agama dari kekuasaan dan justru menunjukkan bahwa agama selalu diproduksi dan direproduksi oleh struktur kekuasaan yang dominan. Dalam konteks UEA, negara memainkan peran sebagai aktor utama dalam produksi wacana keagamaan yang moderat, inklusif, dan kompatibel dengan proyek pembangunan nasional (Asad, 2003).

Tentu, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pengamat menyebut bahwa pengelolaan agama oleh negara berisiko meminimalisasi dinamika kritis dalam keagamaan. Islam dalam kerangka negara bisa kehilangan fungsi profetiknya sebagai kekuatan pembebas atau korektif terhadap kekuasaan. Namun, dari perspektif stabilitas sosial dan pembangunan, pendekatan ini justru dianggap sukses karena mampu menciptakan tatanan sosial yang relatif stabil dan damai, tanpa gejolak ideologis (Sahih, 2021).

UEA menunjukkan bahwa dalam masyarakat Muslim modern, legitimasi kekuasaan tidak hanya bisa dibangun dari hukum positif atau partisipasi politik

formal, tetapi juga dari pengelolaan simbolik terhadap agama. Dalam kerangka sosiologi agama, ini merupakan contoh bagaimana negara dapat menggunakan agama bukan sebagai oposisi terhadap kekuasaan, tetapi sebagai bagian dari rekayasa sosial yang produktif (Asad, 2003).

### **TRANSFORMASI SOSIAL DALAM VISI UEA 2021**

Visi UEA 2021, yang diluncurkan pada tahun 2010, menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan nasional Uni Emirat Arab. Dokumen strategis ini disusun untuk merumuskan arah pembangunan jangka menengah menuju perayaan 50 tahun kemerdekaan UEA. Tidak seperti dokumen pembangunan konvensional yang hanya fokus pada aspek ekonomi atau teknologi, *UAE Vision 2021* secara eksplisit menempatkan nilai-nilai Islam dan identitas nasional sebagai fondasi sosial dalam proses transformasi negara. Dalam kerangka pendekatan sosiologi agama, visi ini menjadi contoh konkret bagaimana negara menggunakan agama sebagai sistem nilai, sarana integrasi sosial, dan simbol modernitas alternatif (Al-Aziz, 2011).

### **Pendidikan Islam dan Karakter Bangsa**

Sektor pendidikan menjadi fokus utama dalam Visi 2021 karena dipandang sebagai motor penggerak masa depan bangsa. Namun, pendidikan di UEA tidak diarahkan semata-mata untuk mengejar sains dan teknologi, melainkan juga membentuk karakter bangsa berbasis nilai Islam. Pemerintah menyusun kurikulum nasional yang tidak hanya mengajarkan pelajaran keagamaan secara tekstual, tetapi juga nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial, toleransi, kerja keras, dan etos belajar yang Islami. Sebagaimana tertulis dalam *Education Sector Strategy Visi 2021*:

“Our students will be well-versed in their religion and culture while being equipped with the skills to participate in a global knowledge economy.” (*UAE Vision 2021, Education Sector Strategy, 2010*).

Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana reproduksi nilai Islam yang dikontekstualisasikan dalam dunia modern. Dalam pendekatan sosiologi agama, ini menunjukkan bahwa Islam difungsikan sebagai sistem nilai yang ditanamkan secara institusional, bukan sekadar diajarkan di masjid atau rumah. Proses ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan formal dan menjadi instrumen pembentukan *moral citizenship* (Said, 2019).

### **Pemberdayaan Perempuan dan Islam Progressif**

Salah satu keberhasilan transformasi sosial di UEA adalah pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor strategis. Negara menempatkan perempuan dalam posisi penting: sebagai menteri, diplomat, pengusaha, bahkan anggota militer. Menariknya, kebijakan ini tidak didasarkan pada wacana feminisme Barat, tetapi justru dibingkai dalam nilai keadilan Islam. Negara menekankan bahwa Islam mengakui peran penting perempuan dalam pembangunan umat dan masyarakat. Sebagai contoh, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan pernah berkata:

“The woman is half of society and any country which pursues development should not leave her in poverty or illiteracy.” (*Al Nahyan, 1990*)

Kutipan ini sering digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan program-program inklusif yang memberikan akses pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan bagi perempuan. Dalam sosiologi agama, hal ini mencerminkan bagaimana Islam direkonstruksi sebagai sumber legitimasi sosial untuk transformasi gender, bukan sebagai alat pelestarian patriarki (Sadr, 2017).

### **Islam sebagai Landasan Toleransi Beragama dan Pembangunan Ekonomi di Uni Emirat Arab**

Transformasi sosial yang berlangsung di Uni Emirat Arab (UEA) menunjukkan bagaimana Islam dijadikan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang multikultural dan berkelanjutan secara ekonomi. Dalam ranah sosial, UEA menempatkan nilai toleransi beragama sebagai pilar pembangunan masyarakat yang plural. Tahun 2019 ditetapkan sebagai Year of Tolerance,

menandai komitmen negara untuk mendorong koeksistensi damai antaragama dan etnis (Albrithen et al., 2024). Langkah konkret seperti penyelenggaraan Document on Human Fraternity dan pembangunan Abrahamic Family House—kompleks ibadah bagi tiga agama besar (Islam, Kristen, dan Yahudi) yang berdiri berdampingan di Abu Dhabi menegaskan narasi negara bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan tasamuh (toleransi) dan ta'ayush (koeksistensi) sebagai prinsip hidup bermasyarakat (Albrithen et al., 2024).

Narasi ini bukan semata retorika simbolik, melainkan diwujudkan dalam kebijakan yang mengatur relasi sosial antaragama secara nyata. Dengan pendekatan sosiologi agama, nilai-nilai Islam dipakai sebagai instrumen konstruksi sosial yang membangun harmoni dan menghindari konflik di masyarakat yang heterogen secara agama dan etnis (Baycar & Rakipoglu, 2022). Penguatan ini juga didukung oleh pembentukan Ministry of Tolerance and Coexistence yang bertugas merancang serta mengimplementasikan kebijakan lintas agama, memperlihatkan bagaimana Islam berperan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) untuk menciptakan stabilitas dan kedamaian (Al-Suwaidi, 2020).

Selain peran sosial, Islam juga menjadi basis dalam pengembangan ekonomi di UEA. Meskipun sistem ekonomi negara ini tidak sepenuhnya menerapkan prinsip ekonomi Islam secara formal seperti di beberapa negara lain, UEA telah mengembangkan sektor keuangan syariah yang signifikan, termasuk bank-bank syariah, asuransi Islam (takaful), dan lembaga pengelola zakat yang terinstitusionalisasi (Kourgiotis, 2020). Zakat tidak hanya menjadi ritual ibadah, tetapi dikelola secara profesional oleh negara untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, yang semuanya berlandaskan pada prinsip masalah (kepentingan umum) dan adl (keadilan sosial) (Albrithen et al., 2024; Kourgiotis, 2020).

Dari perspektif sosiologi agama, fenomena ini menegaskan bahwa Islam berfungsi tidak hanya sebagai norma moral, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang konkret dan berpengaruh dalam proses pembangunan sosial-ekonomi. Dengan demikian, Islam di UEA memainkan peran ganda sebagai landasan bagi toleransi

dan koeksistensi antaragama serta sebagai kerangka normatif dalam pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **Islam sebagai Simbol Peradaban Masa Depan**

Visi 2021 bukan hanya akhir, tetapi jembatan menuju UAE Centennial 2071 proyek jangka panjang yang menempatkan UEA sebagai negara maju berbasis nilai. Dalam strategi tersebut, Islam tetap dijadikan sebagai fondasi spiritual bangsa yang memandu arah peradaban masa depan (Al Orami, 2020; Baycar & Rakipoglu, 2022).

Pemerintah menekankan bahwa Islam harus menjadi kekuatan inovatif, terbuka, dan mendukung pengetahuan. Konsep hikmah (kebijaksanaan), ijtihad (usaha intelektual), dan ilmu (pengetahuan) dijadikan titik tolak untuk mengembangkan masyarakat berbasis riset, teknologi, dan kreativitas. Dengan cara ini, negara membingkai Islam sebagai sumber daya simbolik yang tak terbatas, bukan beban tradisional (Albrithen et al., 2024).

### **KESIMPULAN**

Studi terhadap Uni Emirat Arab melalui pendekatan sosiologi agama memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sebuah negara Muslim modern dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pembangunan sosial-politik tanpa harus melepaskan diri dari tuntutan modernitas global. UEA menunjukkan bahwa Islam tidak hanya hidup sebagai doktrin spiritual atau simbol budaya, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang membentuk kebijakan publik, sistem pendidikan, struktur kekuasaan, dan orientasi masa depan negara. Melalui dokumen UAE Vision 2021, negara secara sadar menjadikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi dalam transformasi nasional. Nilai-nilai seperti masalah, maqashid al-shariah, hikmah, dan tasamuh dijadikan dasar normatif dalam menyusun kebijakan yang progresif, inklusif, dan adaptif terhadap globalisasi. UEA membuktikan bahwa pembangunan negara tidak harus bersifat sekular atau antireligius, tetapi bisa dibangun dari nilai-nilai keagamaan yang diartikulasikan secara modern

Dalam kerangka sosiologi agama, praktik UEA menunjukkan bahwa agama dapat menjadi sumber legitimasi kekuasaan, instrumen integrasi sosial, serta mekanisme penggerak transformasi sosial yang berkelanjutan. UEA tidak sekadar mempertahankan Islam sebagai warisan, tetapi mereformulasi dan mengelolanya dalam bentuk institusional yang relevan dengan zaman. Pendekatan ini membuka ruang bagi model negara Muslim yang spiritual sekaligus modern, konservatif dalam nilai namun progresif dalam visi. Dengan demikian, makalah ini menyimpulkan bahwa UEA menawarkan model pembangunan Muslim kontemporer yang memadukan kekuatan agama dan rasionalitas modern secara harmonis. Studi ini juga memberikan kontribusi pada wacana pengembangan negara-negara Muslim yang ingin mempertahankan identitas Islam dalam menghadapi dinamika abad ke-21.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abaza, M. (1991). The Discourse on Islamic Fundamentalism in the Middle East and Southeast Asia: A Critical Perspective. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, No. 2 (AUGUST 1991), Vol. 6, 203-239 (37 pages).
- Al-Aziz, M. (2011). *Islamic Modernity and Political Reform in the UAE*. *Islamic Studies Journal*, 12(4), 233-246.
- Al Nahyan, S. Z. (1990). *Speech on Women's Empowerment in the UAE*. Government of the United Arab Emirates.
- Al Oraimi, S. Z. (2020). Diversity and social cohesion in the United Arab Emirates. *RUDN Journal of Sociology*, 20(4), 837-846. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2020-20-4-837-846>
- Albrithen, A., Almemari, M., & Briskman, L. (2024). Islamic Principles and UAE Policies Regarding Protecting Senior Citizens' Rights and Safety. *Social Sciences*, 13(8), 400. <https://doi.org/10.3390/socsci13080400>
- Al-Suwaidi, K. (2020). The UAE and the Challenge of Political Legitimacy Post-Arab Spring 2011-19.
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities*. SAGE.

- Aghajani, J. D. (2024). Muslims' lifeworld during the pandemic and humanistic interpretation of religions. *Contemporary Islam*, 18(3), 367–383. <https://doi.org/10.1007/s11562-023-00530-z>
- Al Oraimi, S. Z. (2020). Diversity and social cohesion in the United Arab Emirates. *RUDN Journal of Sociology*, 20(4), 837–846. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2020-20-4-837-846>
- Baycar, H., & Rakipoglu, M. (2022). The United Arab Emirates' Religious Soft Power through Ulema and Organizations. *Religions*, 13(7), 646. <https://doi.org/10.3390/rel13070646>
- Brown, N. J. (2017). Official Islam in the Arab world: The contest for religious authority. *Carnegie Endowment for International Peace*.
- Connolly, P. (Ed.). (1999). *Approaches to the study of religion*. Cassell.
- Gärtner, C., & Winkel, H. (Eds.). (2021). *Exploring Islam beyond Orientalism and Occidentalism: Sociological approaches*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-33239-6>
- Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Implementasi kebijakan fiskal negara Islam Arab Saudi dan Emirat Arab. *Journal for Islamic Studies*, 7(2).
- Jones, C. W. (2018). New approaches to citizen-building: Shifting needs, goals, and outcomes. *Comparative Political Studies*, 51(2), 165–196. <https://doi.org/10.1177/0010414017695335>
- Goldstein, W. S. (2005). The Dialectics of Religious Rationalization and Secularization: Max Weber and Ernst Bloch. *Critical Sociology*, 31(1–2), 115–151. <https://doi.org/10.1163/1569163053084405>
- Kay, A. (2024). The changing traditions of Islamic public administration: Observing processes of collision, absorption and adaptation. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 46(1), 13–30. <https://doi.org/10.1080/23276665.2023.2275283>
- Kourgiotis, P. (2020). 'Moderate Islam' Made in the United Arab Emirates: Public Diplomacy and the Politics of Containment. *Religions*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.3390/rel11010043>
- Koleva, P. (2021). Towards the development of an empirical model for Islamic corporate social responsibility: Evidence from the Middle East. *Journal of*

*Business Ethics*, 171(4), 789–813. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04465-w>

Kourgiotis, P. (2020). ‘Moderate Islam’ made in the United Arab Emirates: Public diplomacy and the politics of containment. *Religions*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.3390/rel11010043>

Laurano, P. (2023). The Arab Spring as a challenge to the Weberian analysis of Islam. *Intersections*, 9(3), 107–129. <https://doi.org/10.17356/ieejsp.v9i3.1129>

Mandaville, P., & Hamid, S. (2018). *Islam as statecraft: How governments use religion in foreign policy*. Brookings Institution. <https://www.issuelab.org/permalink/download/40709>

Monier, E. (2023). Religious tolerance in the Arab Gulf states: Christian organizations, soft power, and the politics of sustaining the “family–state” beyond the rentier model. *Politics and Religion*, 1–18. <https://doi.org/10.1017/S175504832300007X>

Mustaffa, S. U. S., & Abadi, A. M. (2024). Perkembangan konsep Islam moderat dan implikasinya terhadap keabsahan pemerintahan Emiriah Arab Bersatu (UAE). (*Manuskrip tidak mencantumkan nama jurnal*)

Rusydi, M. (2019). Modernitas dan globalisasi: Tantangan bagi peradaban Islam. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 17(1), 91–108. <https://doi.org/10.30631/tjd.v17i1.67>

Schneider, F. G. (n.d.). The stalling visions of the Gulf: The UAE’s Vision 2021. (*Metadata belum lengkap*)

Silaen, P. A., Huda, K., Berutu, L. A. K., & Albani, M. (2024). Modernisasi dan sekularisasi pemikiran Islam di Indonesia. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2), 92–105. <https://doi.org/10.37329/metta.v4i2.3382>

Tlaiss, H. A., & McAdam, M. (2021). Unexpected lives: The intersection of Islam and Arab women’s entrepreneurship. *Journal of Business Ethics*, 171(2), 253–272. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04437-0>

Turner, B. S. (2011). *Religion and modern society: Citizenship, secularisation and the state*. Cambridge University Press.

- Sari, R. M., Rodiah, I., & Fauzi, A. (2024). An examination of Talal Asad's anthropological thought on the Islamic community of Sasak Lombok. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 14(1).
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi realitas sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang kenyataan sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>
- Fradi, G., & Hamdan, S. (n.d.). *Study on strategies for developing cultural heritage and educational excellence*.
- Al Saadi, A. S. (2021). *Cultural heritage protection strategies in the UAE: A sociological perspective*. (Tidak disebutkan jurnal – kemungkinan bagian dari laporan institusi).
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Asad, T. (1993). *Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam*. Johns Hopkins University Press.
- Asad, T. (2007). *On suicide bombing*. Columbia University Press.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago Press.
- Eickelman, D. F., & Piscatori, J. (2004). *Muslim politics* (New edition). Princeton University Press.
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The search for a new Ummah*. Columbia University Press.
- Hefner, R. W. (1998). Multiple modernities: Christianity, Islam, and Hinduism in a globalizing age. *Daedalus*, 127(3), 83–104.
- Hurd, E. S. (2008). *The politics of secularism in international relations*. Princeton University Press.
- Bowen, J. R. (2007). *Why the French don't like headscarves: Islam, the state, and public space*. Princeton University Press.

- Agrama, H. A. (2010). Secularism, sovereignty, indeterminacy: Is Egypt a secular or a religious state? *American Ethnologist*, 37(4), 729–745. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2010.01280.x>
- Mahmood, S. (2011). *Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Ghabra, S. (2014). The Islamic movement in the Gulf: Between opposition and integration. *Middle East Policy*, 21(3), 116–130. <https://doi.org/10.1111/mepo.12086>
- Lacroix, S. (2016). Saudi Arabia's religious reforms: The silent revolution. *Foreign Affairs*, 95(5), 136–146.
- Mandaville, P. (2007). *Global political Islam*. Routledge.
- Moosa, E. (2006). Muslim ethics and modernity: A comparative perspective. *Journal of Religious Ethics*, 34(3), 373–399. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9795.2006.00273.x>
- Gorski, P. S. (2000). Historicizing the secularization debate: Church, state, and society in late medieval and early modern Europe, ca. 1300 to 1700. *American Sociological Review*, 65(1), 138–167. <https://doi.org/10.2307/2657298>
- Turner, B. S. (2007). Religious authority and the new media. *Theory, Culture & Society*, 24(2), 117–134. <https://doi.org/10.1177/0263276407075001>
- Turner, B. S. (2006). Classical sociology and the sociology of religion. *Sociology of Religion*, 67(1), 5–27. <https://doi.org/10.1093/socrel/67.1.5>
- Turner, B. S. (Ed.). (1999). *Classical sociology*. SAGE.
- Elbadawi, I. (2017). *The Role of Islam in Development: Perspectives from the UAE*. *Journal of Middle Eastern Studies*, 34(1), 85-101.
- Said, E. (2019). *Education and Islamic Values in the UAE: A Model for Modernity*. *Journal of Educational Reform*, 10(2), 56-72.
- Sadr, M. (2017). *Islam, Gender, and Development: A New Approach to Empowering Women*. *Middle Eastern Social Review*, 9(3), 112-130.
- UAE Vision 2021. (2010). *Executive Summary*.

UAE Vision 2021. (2010). *Education Sector Strategy*.